

**STRATEGI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DALAM UPAYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI
KOTA MATARAM TAHUN 2021-2023**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu. (S1)

Program Studi Administrasi Publik.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Mataram



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI KEBIJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**STRATEGI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM UPAYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI KOTA MATARAM TAHUN 2021-
2023**

Oleh :

Ade Ningsih

Untuk memenuhi Ujian Akhir

Pada tanggal 12 Februari 2024

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN: 0806066801

Pembimbing II

M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP
NIDN: 0809039203

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Administrasi Publik

Rahman Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN: 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN

**STRATEGI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM UPAYA
PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN SEKOLAH
DASAR DI KOTA MATARAM TAHUN 2021-2023**

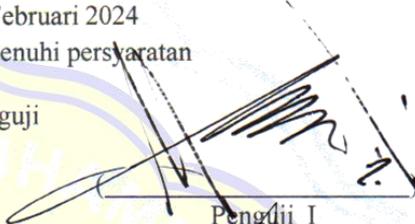
Oleh :

ADE NINGSIH

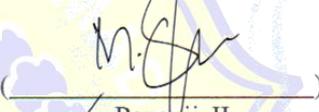
Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 12 Februari 2024
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim penguji

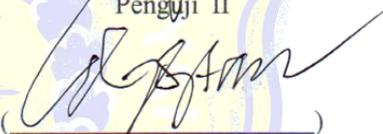
Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801


Penguji I

M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP
NIDN. 0809039203


Penguji II

Drs. Mustamin H. Idris, M.Si
NIDN. 0031126484


Penguji III

Taugetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Mataram, 06 Maret 2024

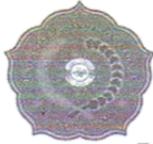
Mahasiswa,



Ade Ningsih

2020B1B047

p



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Mingsih
NIM : 2020B1B047
Tempat/Tgl Lahir : Kore 29 April 2001
Program Studi : Adm Public
Fakultas : Fisipol
No. Hp : 081 236 523 300
Email : adeningih98@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Strategi badan perencanaan pembangunan daerah
dalam upaya pemerataan pembangunan
Infrastruktur pendidikan Sekolah dasar di Kota
Mataram tahun 2021-2023

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 43%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 27 Februari 2024

Penulis



Ade Mingsih
NIM. 2020B1B047

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Ningsih
NIM : 2020B1B047
Tempat/Tgl Lahir : Kore 29 April 2001
Program Studi : Edm Publik
Fakultas : FIP
No. Hp/Email : 081236523308
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:
strategi badan perencanaan pembangunan daerah dalam
upaya pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan
sekolah dasar di kota Mataram Tahun 2021-2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 27 Februari 2024
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Ade Ningsih
NIM. 2020B1B047

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Kelamaan menunggu hanya akan mendatangkan rasa kecewa,cobalah buat waktumu jadi lebih berharga”

Ade Ningsih



PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tidak ada kata seindah lantunan doa yang paling khusuk selain doa yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua lebih-lebih mama.
2. Dan untuk pacar ku Bharada Fuad Misbahul Abidin terimakasih untuk semangat dan dukungannya yang selalu menemani. I love u so much <33



UCAPAN TERIMA KASIH

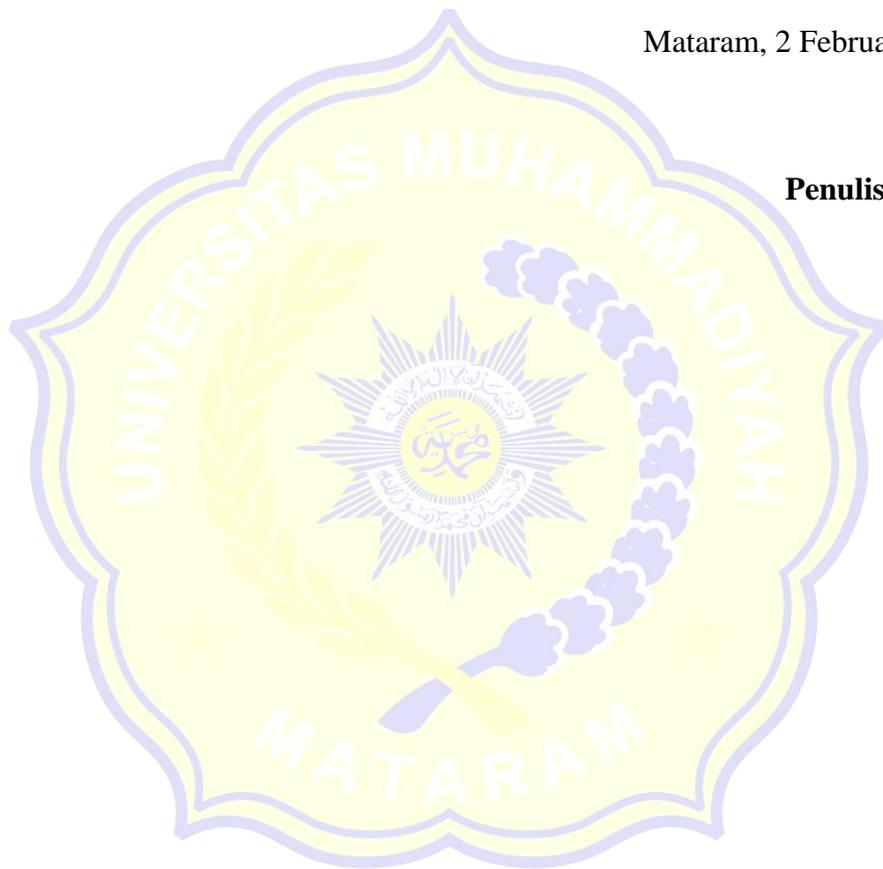
Penulis menyadari penuh bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Sehingga, melalui kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak Drs. Abdul Wahab, M.A.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak. Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak Dr. Rossy Maunofa Hidayat, S.IP., M.IP.
4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus Dosen Pembimbing I, Bapak Amin Saleh, S.Sos., M.I.Kom.
5. Bapak Rahmat Hidayat, S.AP., M.AP, selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak M. Aprian Jailani, S.AP., M.AP, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

8. Yang Penulis cintai dan hormati, yakni kedua orang tua (Bapak Hendrikus Ariono dan Ibu Yustina Jelumut) serta Saudara/i saya yang sudah bersusah payah mendukung saya dan selalu memberikan motivasi tiada hentinya.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Mataram, 2 Februari 2024

Penulis



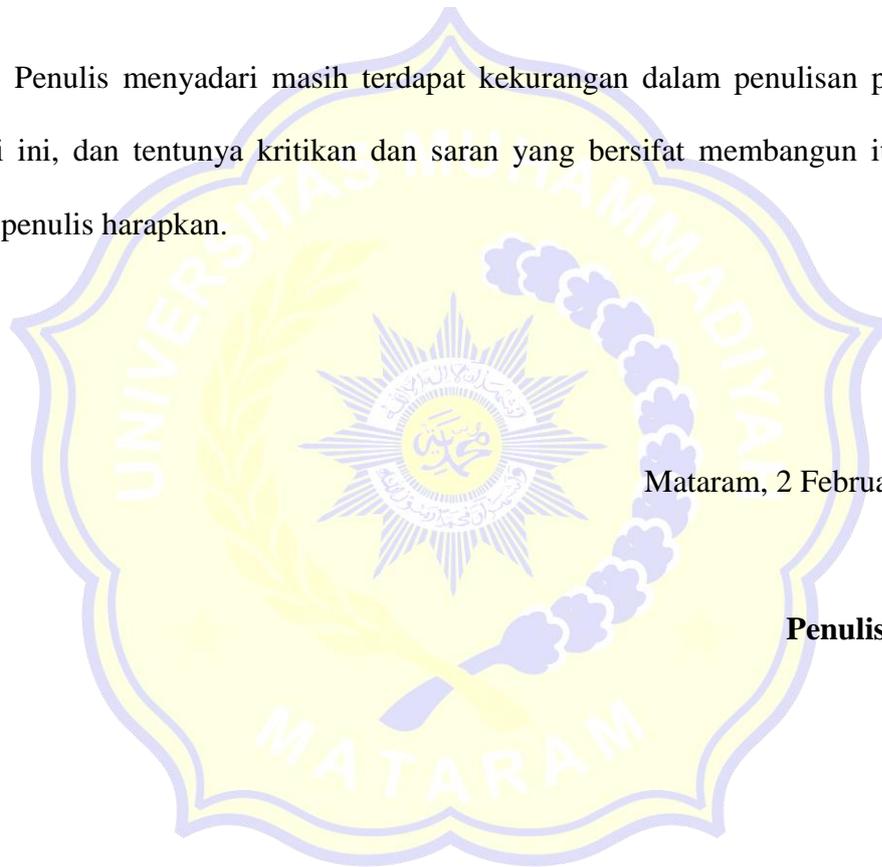
KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Sekolah Dasar Di Kota Mataram Tahun 2021-2023”** Proposal skripsi ini dapat diselesaikan karena ada kerjasama, bantuan dan motivasi dan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP. Selaku ketua prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP. Selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Orang Tua Tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan yang tentunya yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu, yang selalu memberi semangat, membagi pengalaman serta ilmu pengetahuan dalam penyusunan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini, dan tentunya kritikan dan saran yang bersifat membangun itu yang selalu penulis harapkan.



Mataram, 2 Februari 2024

Penulis

**STRATEGI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM UPAYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI KOTA MATARAM TAHUN 2021-
2023**

**Oleh :
Ade Ningsih
2020B1B047**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan referensi literatur ilmiah yang berharga dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan. Fokusnya adalah pada perbaikan strategi badan perencanaan pembangunan daerah di Kota Mataram, dengan tujuan mencapai pembangunan infrastruktur yang lebih seimbang.

Deskripsi data penelitian mencakup pemberian penjelasan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan peneliti selama proses penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji strategi Bappeda dalam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan sekolah dasar di Kota Mataram pada tahun 2021 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara, dan analisis dokumentasi. Sumber utama penelitian ini adalah fakta dan tindakan informan penelitian yang diwawancarai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan mutu di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi Pendidikan dalam dinamika keragaman social dan budaya. Mutu Pendidikan dilihat dari meningkatnya Pendidikan karakter yang meliputi keteguhan iman dan Takwa, etika, Wawasan kebangsaan, dan kualitas jasmani. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan terlihat dari pencapaian kemampuan akademis dan non-akademik tingkat lanjut, memberdayakan lulusan untuk secara aktif mengatasi dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Kata Kunci : Strategi, Pembangunan, Pendidikan

**THE STRATEGY OF REGIONAL PLANNING AGENCY TO EQUALLY
DISTRIBUTE ELEMENTARY SCHOOL INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT
IN MATARAM CITY 2021-2023**

By:
Ade Ningsih
2020B1B047

ABSTRACT

This research aims to provide valuable scientific literature references and contribute to the development of knowledge, particularly in the field of Government Science. The focus is on improving the regional planning agency's strategy in Mataram City, with the aim of achieving more balanced infrastructure development.

The research data description includes an explanation of the data obtained from observations conducted by the researcher during the research process. In this study, the researcher examines the strategy of the Regional Planning Agency (Bappeda) in promoting the distribution of elementary school infrastructure development in Mataram City from 2021 to 2023. This research used a qualitative approach to collect descriptive data through field observations, interviews, and documentation analysis. The main sources of this research are the facts and actions of the research informants who were interviewed. The results show that future quality improvement is expected to have an impact on the realization of the existence of education in the dynamics of social and cultural diversity. The quality of education is seen from the increasing character education which includes firm faith and piety, ethics, national insight, and physical quality. The improvement in the quality and relevance of education is seen from the achievement of academic and non-academic abilities at an advanced level, empowering graduates to actively address the evolving social dynamics in society.

Keywords: *Strategy, Development, Education*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

UNIVERSITAS MUHAMMAD
KEPALA
OPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMAD
MATAAIRAH MATARAM


Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

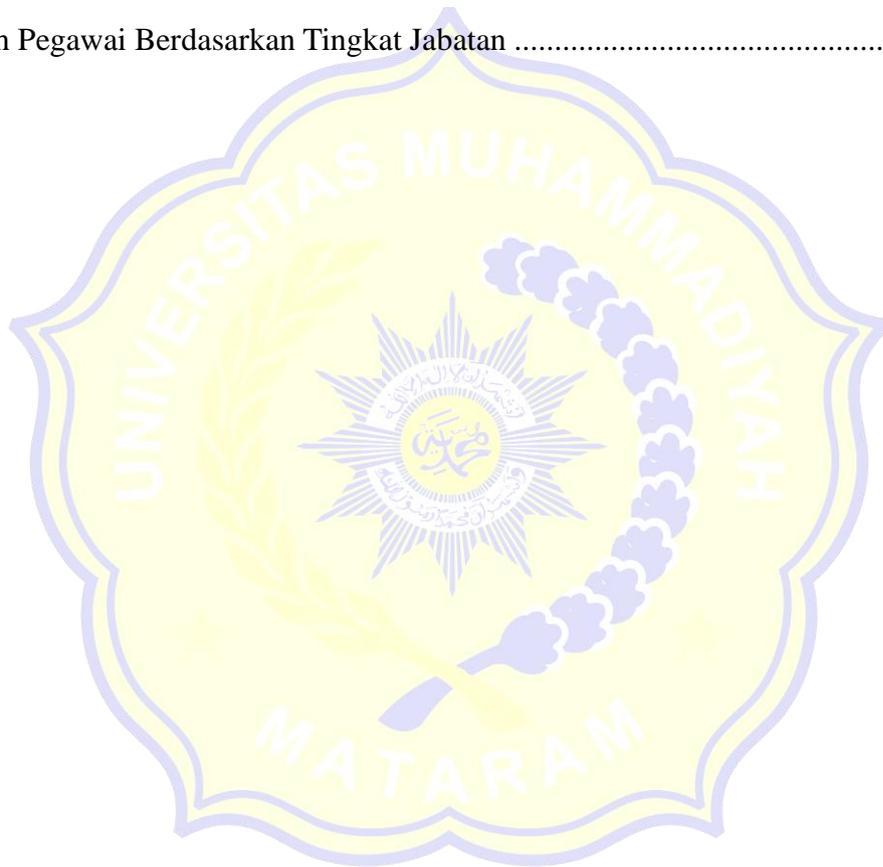
| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME..... | v |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| ABSTRAK | xiii |
| ABSTRACT | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| DAFTAR GAMBAR | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 16 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 16 |
| 1.4 Manfaat penelitian | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 18 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 18 |
| 2.2 Landasan Teori | 21 |
| 2.2.1 Konsep Pendidikan | 21 |
| 2.2.2 Konsep Pemerataan Pendidikan..... | 25 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 2.3 | Infastruktur Pendidikan..... | 28 |
| 2.4 | Konsep Strategi | 32 |
| 2.5 | Konsep Pembangunan Daerah | 33 |
| 2.5.1 | Tujuan Pembangunan Daerah | 34 |
| 2.5.2 | Perencanaan Pembangunan Daerah | 35 |
| 2.6 | Konsep Badan Perencanaan Pembangunan Daerah..... | 35 |
| 2.7 | Kerangka Berpikir..... | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | 38 |
| 3.1 | Jenis Penelitian..... | 38 |
| 3.2 | Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 38 |
| 3.3 | Sumber Data..... | 38 |
| 1. | Data Primer | 38 |
| 2. | Data Sekunder | 39 |
| 3.4 | Teknik Informan..... | 39 |
| 3.5 | Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| 1. | Observasi..... | 39 |
| 2. | Wawancara | 39 |
| 3. | Dokumentasi..... | 39 |
| 3.6 | Teknik Analisa Data | 40 |
| 3.7 | Validasi Data | 41 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | | 43 |
| 4.1 | Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 43 |
| 1. | Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan..... | 43 |
| 2. | Visi dan Misi Bappeda Kota Mataram | 45 |
| 3. | Struktur Organisasi Bappeda Kota Mataram | 49 |
| 4. | Sumber Daya..... | 55 |
| 4.2 | Hasil Penelitian | 58 |
| 4.2.1 | Strategi Bappeda Dalam Merencanakan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di Kota Mataram | 59 |

| | | |
|--------------------------------|--|-----------|
| 4.2.2 | Kendala Bappeda Kota Mataram Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Mataram Tahun 2021-2023 | 63 |
| 4.2.3 | Pembahasan..... | 65 |
| 4.3 | Faktor-Faktor Yang Menghambat Dan Mendukung Bappeda dalam Pembangunan Infrastruktur Pendidikan | 66 |
| 4.3.1 | Faktor Pendukung Bidang Pendidikan..... | 66 |
| 1. | Pada point akses Pendidikan | 67 |
| 2. | Pada point tata Kelola Pendidikan..... | 68 |
| 3. | Pada Point infrastruktur Pendidikan..... | 69 |
| 4.3.2 | Faktor Penghambat Bappeda Kota Mataram | 69 |
| BAB V | PENUTUP | 73 |
| 5.1 | Kesimpulan | 73 |
| 5.2 | Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 75 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | 78 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Penelitian Terdahulu..... | 18 |
| Jumlah Sekolah di Kota Mataram..... | 48 |
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 56 |
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 56 |
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan..... | 57 |
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan..... | 57 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Struktur Organisasi Bappeda Kota Mataram | 51 |
|--|----|



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya merupakan landasan penting yang dijadikan landasan untuk menciptakan transformasi menuju keadaan yang lebih maju bagi suatu negara. Pembangunan adalah suatu proses perbaikan dan pertumbuhan yang seimbang pada seluruh aspek kehidupan, meliputi aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek pemerintahan, aspek pertahanan dan keamanan, serta aspek ideologi. Bagi negara Indonesia, pelaksanaan pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional bangsa, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Menurut data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia (2021), terdapat 44.644.261 siswa yang tersebar di seluruh wilayah dengan jumlah gedung sekolah sebanyak 217.270 orang. Sebanyak 8.314.120 peserta didik pada tahun 2019 terdaftar di 4.621 lembaga pendidikan yang terdiri dari universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, akademi komunitas, dan politeknik (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2021). Data partisipasi pendidikan anak usia sekolah disebut terus meningkat setiap tahunnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun jumlah anak putus sekolah juga tidak bisa dikatakan sedikit. Di seluruh daerah pada tahun 2019, terdapat 4.586.332 anak usia sekolah

yang putus sekolah karena berbagai faktor (ABC Indonesia, 2019). Dengan data tersebut, banyak sekali anak-anak yang mempunyai potensi untuk memajukan kondisi suatu daerah namun terkendala karena pendidikan yang belum tuntas dan tidak berdaya sesuai kemampuan masing-masing individu.

Melalui pendidikan, sumber daya manusia dapat memperoleh pengetahuan, informasi, kemampuan, dan lain sebagainya. Pentingnya pendidikan akan berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran kolektif dan mempertahankan demokrasi dalam proses kolaboratif dan inklusif, yang melampaui partisipasi normatif (Michelutti & Guaran, 2022). UNESCO atau United Nations Educational Scientific and Cultural Organization mengatakan terdapat empat pilar dalam pendidikan, yaitu: Learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live (Aqshadigrama, 2018). Maksud dari keempat pilar tersebut adalah agar individu yang menempuh pendidikan atau dengan kata lain belajar dapat memperoleh ilmu pengetahuan, terampil dalam melakukan sesuatu, mengembangkan dirinya, dan mampu menjalani kehidupan dengan baik bersama makhluk lain. Dengan demikian, tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai.

Pembangunan sumber daya manusia dalam pembangunan dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan pendidikan yang optimal, pelayanan kesehatan yang baik, pelayanan pendidikan dan ketenagakerjaan, pengenalan teknologi baru, reformasi birokrasi, dan pemberian peluang aktualisasi (Safri, 2016). Dalam penelitiannya, Safri (2016) tidak menyebutkan apakah pengembangan sumber daya manusia berhasil dengan konsep yang disampaikan dalam pembahasannya.

Peningkatan sumber daya manusia akan mempengaruhi perubahan perekonomian di suatu wilayah. Masyarakat yang mempunyai banyak pengetahuan dan kemampuan karena terdidik dapat menciptakan lapangan kerja sendiri atau bekerja dengan standar upah yang tinggi, sehingga tingkat kemiskinan juga dapat menurun. Peningkatan sumber daya manusia akan membantu pertumbuhan ekonomi, dengan pendidikan sebagai salah satu bentuk investasi diyakini menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan sektor pembangunan lainnya (Widiansyah, 2017). Manusia yang mampu meningkatkan perekonomian akan menciptakan taraf hidup yang lebih baik, sehingga kesenjangan sosial ekonomi dapat dipersempit.

Solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mensukseskan pembangunan adalah dengan meningkatkan pendidikan terlebih dahulu agar masyarakat tidak dianggap sebagai masyarakat yang kurang berpendidikan. Sementara itu, solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, pihak swasta serta perguruan tinggi dan lembaga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya daerah, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, serta meningkatkan perkapita. pendapatan, sedangkan untuk mengatasi kemiskinan yaitu pemerintah daerah harus meningkatkan kesehatan dan infrastruktur, pendidikan, stabilitas pangan, serta jumlah penduduk dan lapangan kerja (Laurens & Putra, 2020).

Ketika mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dalam sistem inovasidaerah, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan spesifik wilayah tersebut. Inovasi daerah dapat didorong oleh berbagai sektor, termasuk perguruan

tinggi (Firsova et al., 2020). Pentingnya informasi pendidikan setara dengan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, karena kedua aspek ini harus diselaraskan dengan erat. Mutu pendidikan erat kaitannya dengan ketersediaan sumber daya pendidikan, yang pada gilirannya dapat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian suatu daerah. Hubungan antara perkembangan informasi pendidikan dan pembangunan ekonomi daerah bersifat saling bergantung dan timbal balik (Shi, 2021).

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan penting yang tidak terpisahkan dari setiap proses pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Proses perencanaan pembangunan memainkan peran penting dalam meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan inisiatif pembangunan di berbagai sektor, dengan mempertimbangkan tantangan dan karakteristik unik masing-masing daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terus menemui kendala dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Salah satu tantangannya adalah kurangnya pengetahuan perencanaan, yang mencakup ketidaktahuan terhadap aturan penyusunan dokumen perencanaan, serta kurangnya dukungan terhadap data realisasi kinerja dan penganggaran. Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam melaksanakan integrasi di daerahnya masing-masing. Mereka diharapkan proaktif dalam mengatasi permasalahan pembangunan dan mencari solusi.

Untuk mencapai cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spiritual, maka diperlukan strategi pembangunan yang baik. Strategi ini harus

memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan mereka sendiri dan meningkatkan standar hidup mereka. Penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh tahapan pembangunan.

Pembangunan merupakan suatu proses kompleks yang memerlukan perencanaan yang matang dan cermat guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan faktor, salah satunya adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam seluruh tahapan pembangunan, dimulai dari proses perencanaan. Keterlibatan masyarakat dalam mengatasi kondisi dan mengidentifikasi kebutuhan. Selain itu, menumbuhkan rasa keterlibatan dan kepemilikan antar individu dapat meningkatkan kepercayaan terhadap program pembangunan. Hal ini, pada gilirannya, mendorong partisipasi aktif dalam memantau kemajuan pembangunan, sehingga mengarah pada peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program-program tersebut.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan akuntabilitas yang luas dalam mengatur, mengelola, dan melaksanakan pembangunan di daerahnya. Hal ini dilakukan melalui inisiatif mereka sendiri, berpedoman pada prinsip desentralisasi yang disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Eksplorasi potensi dan keunikan masing-masing daerah. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi penduduk lokal sejalan dengan lanskap pembangunan daerah yang terus berkembang. Pembangunan di tingkat daerah

bervariasi berdasarkan keunikan sumber daya, kebutuhan, dan kemampuan masing-masing daerah. Indikator pembangunan daerah dapat diturunkan dari indikator ekonomi dan sosial yang ada pada suatu wilayah tertentu (Pratama, 2020). Indikator perekonomian dapat dianalisis dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti laju pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan Produk Nasional Bruto (GNP). Indikator sosial dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup faktor-faktor seperti angka harapan hidup, tingkat pengetahuan dan literasi. Indikator lainnya, Physical quality life index (PQLI), berfokus pada angka harapan hidup pada usia satu tahun, angka kematian, dan angka buta huruf. Pemerintah daerah harus memprioritaskan indikator sosial untuk mendukung indikator ekonomi. Dengan memaksimalkan pembangunan di bidang sosial, maka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu cara untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas adalah dengan menjadikan pendidikan sebagai bagian dari perencanaan wilayah. Ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan, yaitu: profesionalisme, daya saing, kompetensi fungsional, keunggulan partisipatif, dan kerjasama (Ningrum, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2016) menyatakan bahwa kendala apa saja yang dihadapi dalam dunia pendidikan selain kelima indikator yang disebutkan merupakan domain penting dalam pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai suatu upaya sistematis yang bertujuan untuk menjamin setiap manusia mencapai tahap tertentu dalam hidupnya, misalnya kebahagiaan lahir dan batin (Yusuf, 2018).

WEF mengelompokkan 12 pilar daya saing sebagai pendorong produktivitas suatu daerah, yaitu: kelembagaan, infrastruktur, makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar dan inovasi. Maka untuk meningkatkan daya saingnya, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang ketat dan melaksanakan supremasi hukum, pemerintahan yang bersih, keadilan dalam pemerataan ekonomi, stabilitas politik, keamanan dan ketertiban masyarakat, inovasi teknologi dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Saat ini penataan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai daerah otonom semakin menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih baik. Hal ini terlihat dari perkembangan pelaksanaan otonomi daerah secara umum, serta penataan kewenangan, pemilihan kepala daerah, dan perkembangan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mendukung terciptanya NTB sebagai daerah otonom yang berdaya saing, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program strategis seperti peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, penyediaan prasarana dan sarana, pemberdayaan ekonomi, serta pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan penguatan ketahanan pangan.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Pendidikan antara lain melalui perkembangan akses terhadap Pendidikan anak usia dini, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, evaluasi dan perbaikan kurikulum serta peningkatan kualitas, serta kompetensi dan profesionalisme guru. Dengan pembangunan pendidikan yang berkualitas, masyarakat mempunyai daya saing

dan kompetensi yang baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga kualitas hidup dapat lebih baik dari generasi sebelumnya.

Pendidikan memiliki peranan penting untuk menunjang kehidupan manusia karena dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. Isu pendidikan seperti pendidikan tidak merata, diskriminasi gender dalam pendidikan, pendidikan berkualitas itu “mahal” menjadi perhatian masyarakat global sehingga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) berkomitmen untuk mewujudkan Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) yang berisikan tujuan: (1) memperluas pendidikan usia dini, (2) menyediakan pendidikan dasar yang gratis dan wajib (Wajib Belajar), (3) meningkatkan pendidikan kecakapan hidup (*life skill*), (4) meningkatkan angka melek huruf, (5) menghapus kesenjangan gender, dan (6) meningkatkan mutu pendidikan

Pendidikan merupakan hak mendasar di dalam nilai kehidupan manusia. Tujuan keempat pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pendidikan di Indonesia dipandang sebagai komponen penting dalam mewujudkan bangsa yang kuat, adil, dan sejahtera. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mengedepankan keimanan, ketakwaan, dan nilai-nilai moral untuk membina kesejahteraan bangsa. Tunduk pada peraturan hukum.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perkembangan pembangunan bidang pendidikan dipantau secara berkesinambungan berdasarkan data dan indikator. Indikator pendidikan menggambarkan kondisi dan perkembangan pendidikan secara tepat antara lain, Angka Partisipasi Sekolah (APS), APS 7-12 tahun menurut kelompok pengeluaran relatif sama untuk semua kuintil, APS terendah berada pada kuintil 1 sebesar 99,24 persen dan tertinggi 99,87 persen pada kuintil 3. APS 13-15 tahun terendah berada pada kuintil 1 sebesar 96,01 persen dan yang tertinggi berada pada kuintil 3 sebesar 99,82 persen. Berbeda halnya dengan APS 16-18 tahun, nilai terendah berada pada kuintil 1 sebesar 72,64 persen dan tertinggi berada di kuintil 5 sebesar 85,39 persen.

Angka Melek Huruf (AMH), menunjukkan bahwa pada kelompok umur 15-24 tahun, AMH untuk setiap karakteristik penduduk relatif sama. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan AMH di kelompok umur tersebut tidak begitu terlihat. Sebaliknya terdapat pola yang sama untuk penduduk kelompok umur 15-59 tahun dan 15 tahun ke atas. Kelompok penduduk yang memiliki AMH lebih rendah adalah penduduk yang tinggal di daerah perdesaan, penduduk berjenis kelamin perempuan, dan penduduk yang tinggal di rumah tangga dengan status ekonomi terbawah. Selain itu, AMH pada kelompok umur 15 tahun ke atas berada di bawah 90 persen. Hal ini disebabkan karena pada kelompok umur tersebut mencakup penduduk lanjut usia yang kemampuan keaksaraannya kurang atau

banyak yang sudah lupa. Penyajian data ini diharapkan mampu menggambarkan keadaan pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Seluruh warga negara Indonesia wajib menyelesaikan pendidikan dasar. Pemerintah harus mengupayakan dan membangun sistem pendidikan nasional yang menjamin pemerataan kesempatan dan meningkatkan mutu pendidikan, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Pemerintah telah melakukan upaya signifikan untuk mendorong pemanfaatan anggaran sebesar 20 persen APBN, khususnya di daerah tertinggal, melalui berbagai program pendidikan. Pada bab ini akan dijabarkan keadaan pendidikan tahun 2021 di Provinsi NTB

Partisipasi sekolah diukur melalui tiga indikator, yakni Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Masing-masing indikator memiliki esensi berbeda. Program APS terutama menysasar anak-anak usia sekolah, sedangkan program APK dan APM berpusat pada sejauh mana keterlibatan sekolah berdasarkan tingkat pendidikan. Meskipun pendidikan formal di Indonesia dimulai dari tingkat sekolah dasar, pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, secara aktif menggalakkan penyelenggaraan pendidikan prasekolah untuk mendukung perkembangan anak usia dini yang holistik dan integratif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023 menguraikan tujuan pembangunan pendidikan beserta targetnya pada tahun 2021, beserta kemajuan yang dicapai dalam mencapainya. Nilai indikator yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pemerintah telah secara efektif mencapai pemerataan program pendidikan. Terlihat bahwa target RPJMD yang

sudah tercapai hanya satu indikator yaitu APK SD/ sederajat. Indikator lain masih berada di bawah target. Hal ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk menyusun program dan kebijakan program di sektor pendidikan yang lebih efektif.

Untuk merencanakan pembangunan sektor pendidikan di Kota Mataram secara efektif, penting untuk mengumpulkan data dan informasi yang komprehensif. Data ini tidak hanya mencakup data dari Kementerian Pendidikan saja, namun juga dari sumber eksternal. Memperoleh data dan informasi dari sumber di luar Departemen Pendidikan bisa jadi merupakan suatu tantangan. Variasi data antar lembaga menyebabkan kurangnya konsistensi dalam penyediaan data. Untuk memastikan data yang komprehensif dan terkini mengenai kondisi pendidikan, penting untuk menjalin hubungan dengan sumber informasi eksternal, termasuk administrasi pemerintah daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya, agama, transportasi, dan komunikasi. Selain itu, mengatasi tantangan pendidikan memerlukan pertimbangan tidak hanya faktor internal pendidikan, namun juga faktor eksternal di luar sektor pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diatur bahwa Pemerintah Daerah berperan sebagai koordinator seluruh instansi sektoral, dan Kepala Daerah bertanggung jawab penuh atas pembinaan dan pembangunan daerahnya masing-masing. Pembinaan dan pengembangan ini mencakup berbagai aspek kehidupan dan pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kota Mataram sebagai wilayah pemerintahan kesatuan berkomitmen mencapai arah dan tujuan tertentu melalui pembangunan menyeluruh di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kebudayaan. Rencana pengembangan pendidikan di Kota Mataram terkait erat dengan rencana pembangunan kota secara keseluruhan, sehingga menyoroti peran integralnya. Segala upaya dan kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan di Kota Mataram harus dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram. Koordinasi ini diperlukan untuk menjaga keselarasan dan keterkaitan dengan sektor lain, menjamin tercapainya sasaran dan sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, dampak faktor demografi, dinamika populasi, dan tantangan masyarakat terhadap pendidikan sangatlah signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan faktor kependudukan ketika mempertimbangkan pembangunan pendidikan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk dan usia sekolah di Kota Mataram sebanyak 439.873 jiwa. Rinciannya sebagai berikut: usia 3-4 tahun sebanyak 15.953 orang (3,36%), usia 5-6 tahun sebanyak 16.048 orang (3,65%), usia 7-12 tahun sebanyak 49.648 orang (11,29%), dan usia 13-15 tahun sebanyak 23.822 orang. (5,42%).

Berdasarkan data, jumlah penduduk Kota Mataram pada tahun 2019 mengalami penurunan dari 486.715 jiwa menjadi 439.873 jiwa, turun 46.842 jiwa (10,65%) dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi di seluruh kecamatan, sehingga berdampak pada kepadatan penduduk usia sekolah. Pada tahun 2021, Kecamatan Ampenan di Kota Mataram memiliki kepadatan penduduk tertinggi di antara kecamatan-kecamatan lainnya, yaitu 9.305 jiwa per kilometer

persegi. Angka tersebut melampaui rata-rata kepadatan penduduk di Kota Mataram yang sebesar 7.009 jiwa per kilometer persegi.

Perkembangan pendidikan di Kota Mataram menunjukkan hasil yang menjanjikan. Program pengembangan pendidikan telah secara signifikan meningkatkan lingkungan belajar mengajar di berbagai jenis dan tingkat pendidikan. Dengan melaksanakan program pembangunan, pelayanan pendidikan dapat diperluas ke daerah pinggiran, daerah berpenduduk berpendapatan rendah, dan daerah padat penduduk. Ada variasi dalam perkembangan di berbagai tingkat pendidikan.

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2021/2022, terdapat total 142 TK negeri dan swasta. Taman kanak-kanak ini terdiri dari 367 ruang kelas yang mampu menampung 6.408 siswa. Kelompok belajar berjumlah 427 orang, masing-masing dipimpin oleh 764 orang (dengan perincian 77 orang berstatus ASN dan Non ASN sebanyak 687 orang) Berdasarkan data terakhir tahun 2021/2022, terdapat total 174 SD di wilayah tersebut. Dari jumlah tersebut, 146 merupakan sekolah negeri dan 28 sisanya adalah sekolah swasta. Jumlah siswa yang terdaftar di sekolah tersebut sebanyak 43.620 orang, dengan rincian 35.979 siswa bersekolah di sekolah negeri dan 7.641 siswa bersekolah di sekolah swasta. Jumlah siswanya sebanyak 1.829 orang, dengan rincian 1.277 orang bersekolah di sekolah negeri dan 552 orang bersekolah di sekolah swasta. Terdapat 1.460 ruang kelas swasta, 1.123 di sekolah negeri dan 337 di sekolah swasta. Jumlah guru sebanyak 2.364 orang, yang terdiri dari 1.211 orang PNS dan 1.153 orang non PNS. Berdasarkan data terakhir tahun 2021/2022, terdapat total 47 SMP, baik

negeri maupun swasta. Sekolah-sekolah ini memiliki total 657 ruang kelas dan mempekerjakan 1.262 guru. Populasi siswa di sekolah tersebut berjumlah 19.271 orang, dengan kelompok belajar berjumlah 610 siswa. Berdasarkan data terakhir tahun 2021/2022, terdapat 25 sekolah MTs Negeri dan Swasta. Sekolah-sekolah ini memiliki total 167 ruang kelas dan mempekerjakan 504 guru. Populasi siswa di sekolah tersebut berjumlah 5.063 orang, dengan kelompok belajar sebanyak 198 orang.

Jika dilihat dari status sekolahnya, terlihat bahwa jumlah SMP Negeri lebih banyak dibandingkan SMP Swasta. Rinciannya, SMP Negeri sebanyak 24 orang dengan jumlah siswa 15.460 orang, dan SMP Swasta sebanyak 23 orang dengan jumlah siswa 3.811 orang. Sebaliknya, jumlah MTs Swasta melebihi... Terdapat tiga MTs negeri dengan jumlah siswa gabungan sebanyak 2.226 orang, dibandingkan dengan 22 MTs swasta dengan jumlah siswa sebanyak 2.837 orang.

Indikator berikut berkaitan dengan kualitas prasarana dan sarana pendidikan di SMP Negeri/Swasta. Secara spesifik, terdapat 580 ruang kelas dalam kondisi baik, 74 kondisi rusak ringan, dan 3 rusak berat. Selain itu, terdapat 178 ruang kelas milik MTs yang dalam kondisi baik maupun rusak ringan. Sebanyak 19 buah ditemukan, dengan satu buah rusak berat.

Dari segi pemerataan dapat dinilai dengan menggunakan berbagai indikator, seperti APK, APM, perbandingan antarjenjang, rasio pendidikan, angka kelanjutan, dan tingkat pelayanan sekolah. Jenjang SMP dan MTs mempunyai angka tertinggi, sedangkan jenjang TK, RA, KB, dan TPA mempunyai sebaran terendah. Terbatasnya tingkat kesetaraan ini bermula dari sentralisasi fasilitas

pendidikan di satu lokasi. Jika dicermati kesenjangan jenjangnya, terlihat bahwa masih terdapat ketimpangan antara jenjang TK dan SD, khususnya pada jenjang SMP. Jika tujuannya adalah untuk menyelaraskan tingkat sekolah dasar dengan taman kanak-kanak, maka perlu didirikan sekolah tambahan di kecamatan yang jumlah sekolahnya terbatas. Begitu pula dengan siswa di tingkat sekolah menengah pertama.

Dalam hal peningkatan kualitas, hal ini dapat dinilai dengan menggunakan indikator yang berbeda-beda. Diantaranya adalah persentase lulusan, angka mengulang, angka putus sekolah, angka kelulusan, angka kesesuaian guru, dan persentase kondisi kelas. Jika dilihat dari kesesuaian guru untuk mengajar, menarik untuk dicatat bahwa tingkat SD/MI memiliki jumlah guru yang memenuhi syarat tertinggi, yaitu sebanyak 2.158 orang, sedangkan tingkat PAUD-RA memiliki jumlah guru berkualifikasi terendah, yaitu hanya 1.023 orang. Terdapat banyak ruang kelas pada tingkat SD dan SMP yang kondisinya bervariasi. Secara spesifik, terdapat 1.450 ruang kelas dalam kondisi baik, 202 ruang kelas rusak ringan, dan 43 ruang kelas rusak berat. Peralnya, jumlah SD dan MI lebih banyak dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan diatas maka dilakukan penelitian yang mengkaji tentang strategi dalam menghadapi permasalahan pembangunan daerah dalam bentuk proposal penelitian dengan judul “Strategi Badan Perencanaan Pembangunan daerah dalam Upaya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kota Mataram.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Merencanakan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di Kota Mataram.
2. Bagaimana Faktor-Faktor Yang Menghambat dan Mendukung Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Merencanakan Pemabungan Infrastruktur Pendidikan di Kota Mataram.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Bagaimana Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Merencanakan Pemabangunan Infrastruktur Pendidikan di Kota Mataram
2. Mengetahui Faktor-Faktor Yang Menghambat Dan Mendukung Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Merencanakan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di Kota Mataram.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoristis

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan referensi literatur ilmiah yang berharga dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan. Fokusnya adalah pada perbaikan strategi badan perencanaan pembangunan daerah di Kota Mataram, dengan tujuan mencapai pembangunan infrastruktur yang lebih seimbang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dikaji dan meningkatkan pemahaman mengenai strategi yang dilakukan oleh badan perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur di Kota Mataram.
- b. Bagi Masyarakat dan Pembaca, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga kepada masyarakat dan pembaca tentang strategi yang dilakukan oleh badan perencanaan pembangunan daerah untuk mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur di Kota Mataram.
- c. Bagi BAPPEDA Kota Mataram, Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan dan saran yang berharga bagi BAPPEDA Kota Mataram untuk menyempurnakan strategi perencanaan pembangunan daerah dan mendorong pembangunan infrastruktur di kota yang lebih seimbang.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian dengan memperkaya teori-teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu menjadikan sumber referensi penulis yang dapat memperdalam kajian penelitian mengenai topik yang hampir sama dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama/Judul | Metode | Hasil Penelitian | Perbedaan dan persamaan |
|-----|--|---|--|--|
| 1 | Kasmira Tahun 2020 dengan judul “ <i>Strategi Pemerintahan Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Gowa</i> ” | Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif dengan observasi, wawancara dan dokumentasi | Pendekatan Pemerintah terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan terlihat jelas pada personel yang bertanggung jawab dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan. | Perbedaan, penelitian ini dengan penelitian penulis adalah berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan pada Kabupaten Gowa. Persamaan, penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pembangunan infrastruktur |

| No | Nama/Judul | Metode | Hasil Penelitian | Perbedaan dan Persamaan |
|----|--|---|--|---|
| 2 | Anang Nurdiana Tahun 2021 dengan judul “ <i>Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Infrastruktur Ekonomi di Kabupaten Madiun</i> ” | Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai peranan penting dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Madiun. | Perbedaan, penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian. Persamaan, penelitian adalah sama-sama membahas tentang peran BAPPEDA dalam pembangunan infrastruktur |
| 3 | Nugroho Aji Syaputro Tahun 2019 dengan judul “ <i>Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak Dalam Pengembangan</i> ” | Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah menerapkan strategi untuk meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial di Kabupaten Demak. | Perbedaan, penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas peran BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan sosial di daerah sekala nasional. Persamaan, penelitian ini adalah membahas peran BAPPEDA dalam kebijakan teknik perencanaan |

| No | Nama/Judul | Metode | Hasil Penelitian | pembangunan Perbedaan dan Persamaan |
|----|--|---|---|--|
| 4 | Fazhurrahman Tahun 2022 yang berjudul “ <i>Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pemanfaatan Dana Kelurahan di Kota Bima</i> ” | Metode Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dengan cara wawancara, dokumen, dan pengamatan terhadap proses perencanaan. | Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dana kelurahan yang dilaksanakan di Kota Bima pada aspek kebijakannya sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan tidak ada permasalahan serius. | Perbedaan, penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas peran BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan sosial di daerah Persamaan, penelitian ini adalah membahas peran BAPPEDA dalam kebijakan teknik perencanaan pembangunan daerah. |
| 5 | Masjudin Ashari tahun 2015 yang berjudul “ <i>Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013)</i> ” | Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif dengan observasi, wawancara dan dokumentasi | Berdasarkan temuan Musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten di Kabupaten Lombok Utara, terlihat banyaknya usulan dari masing-masing desa yang diajukan pada musyawarah Musrenbang. | Perbedaan, penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas peran BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan sosial di daerah Persamaan, penelitian ini adalah membahas peran BAPPEDA dalam kebijakan |

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|
| | | | | teknik perencanaan |
|--|--|--|--|--------------------|

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Pendidikan

Dunia pendidikan mengalami kondisi yang sama siswa biasa melakukan interaksi tatap muka untuk tujuan belajar mengajar hingga tahun 1990-an. Media pembelajaran di kelas mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Papan tulis dan kapur tradisional telah digantikan dengan peralatan yang lebih modern seperti papan tulis, spidol, dan over head projector(OHP). Pada tahun 2000an, terjadi peralihan dari penggunaan over head projector (OHP) ke proyektor. Proses pembelajaran kini dapat dilakukan secara online, melalui jaringan. Era disrupti telah membawa perubahan signifikan pada dunia industri. Transformasi ini ditandai dengan munculnya era digital industri 4.0 yang ditandai dengan semakin meluasnya integrasi teknologi informasi ke berbagai aspek kehidupan. Konsep Industri 4.0 menyoroti berbagai aspek seperti Internet of Things, ekonomi digital, big data, kecerdasan buatan, robotika, rekayasa genetika, dan banyak lagi (Priatna, 2019).

Bidang administrasi pendidikan telah mengalami transformasi yang signifikan. Sebelumnya, mahasiswa harus membayar uang sekolah secara fisik dan berinteraksi dengan petugas. Namun, kini mereka mendapat kemudahan dalam mentransfer dana dan mengakses data keuangan, registrasi, dan tugas administratif lainnya secara online melalui aplikasi, sehingga tidak perlu lagi mengisi formulir secara manual. Pengembangan pelayanan administrasi secara komprehensif ini mencakup seluruh aspek pelayanan pendidikan tinggi.

Perkembangan teknologi yang pesat dan radikal, yang biasa disebut dengan disrupsi teknologi, menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk merespons secara efektif. Kemajuan di era disrupsi ini membuat pengetahuan semakin mudah diakses melalui berbagai cara. Perkuliahan daring, digitalisasi perpustakaan atau e-library, serta tersedianya aplikasi pendidikan di mobile smartphone merupakan beberapa perubahan dan perkembangan positif yang memudahkan penyebaran ilmu pengetahuan (Priatna, 2019).

Pengelolaan infrastruktur atau fasilitas pendidikan melibatkan pengawasan pemeliharaan dan pengoperasian sumber daya penting ini. Prasarana pendidikan meliputi berbagai fasilitas yang berperan tidak langsung dalam menunjang proses pendidikan. Diantaranya adalah pekarangan, kebun/taman, jalan, lokasi, lahan, parkir, lapangan olah raga, drainase, instalasi listrik, internet, gedung, kantin, dan lain-lain. Pengelolaan infrastruktur melibatkan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan secara kolaboratif secara efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan meliputi pengadaan, pemanfaatan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang penting untuk menunjang terselenggaranya pendidikan bermutu di sekolah (Ananda & Banurea, 2019). Menurut Mulyasa, pengelolaan infrastruktur pendidikan melibatkan pengorganisasian dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas tersebut untuk memastikan fasilitas-fasilitas tersebut dapat mendukung proses pendidikan secara efektif dan bermakna. Kegiatan pengelolaannya meliputi

perencanaan, pengawasan pengadaan, penyimpanan persediaan, serta penghapusan dan penataan. Menurut Ananda dan Banurea (2019), pengelolaan sarana dan prasarana di Bafadal melibatkan pendekatan kolaboratif untuk memaksimalkan penggunaan peralatan pendidikan secara efektif dan efisien. Rugaiyah mengartikan pengelolaan prasarana sebagai proses pengawasan sarana dan prasarana di lingkungan sekolah untuk menjamin kelancaran seluruh kegiatan, termasuk pembelajaran dan usaha lainnya (Mustari, 2018). Sedangkan Mustari memberikan definisi pengelolaan infrastruktur secara komprehensif. Hal ini mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengadaan, pengelolaan persediaan, pendistribusian, pemanfaatan, pemeliharaan, pemusnahan, dan pertanggungjawaban barang bergerak dan tidak bergerak, termasuk perabot sekolah dan alat pembelajaran (Mustari, 2019). Ananda dan Banurea, pengelolaan sarana dan prasarana meliputi kegiatan yang diperlukan untuk menjamin penyiapan peralatan dan bahan yang tepat untuk kelancaran pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Tujuan penataan ini adalah untuk memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran, baik melalui cara langsung maupun tidak langsung (Ananda & Banurea, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi kemajuan yang signifikan di bidang teknologi dan informasi, khususnya di bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi jarak jauh. Penggunaan teknologi internet telah memainkan peran penting dalam perkembangan ini. Internet telah merevolusi proses pembelajaran,

menghilangkan kebutuhan akan lokasi terpusat seperti kampus, sekolah, kursus, dan pusat pelatihan. Dalam lanskap yang berubah dengan cepat saat ini, diperlukan kreativitas dan inovasi dalam mentransformasikan pengelolaan infrastruktur untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh tanpa memerlukan ruang pertemuan fisik. Kegiatan dalam proses belajar mengajar bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dari segi waktu dan tempat. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran tidak lagi terhalang oleh waktu dan tempat. Kegiatan pembelajaran ini biasa disebut dengan elearning atau electronic-learning.

Saat ini terdapat fenomena global disrupsi teknologi yang berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan tinggi. Indonesia saat ini berada di peringkat 69 dari 76 negara menurut News Indonesia. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi institusi pendidikan tinggi untuk memperbaiki manajemen infrastruktur dan fungsi layanannya untuk memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan, dengan fokus khusus pada mahasiswa. Universitas bertujuan untuk meningkatkan kualitas akademik mereka dalam menghadapi disrupsi teknologi dengan memperbaiki manajemen infrastruktur mereka. (Siti Fitriana, 2019). Dalam penelitian yang dilakukan Siti Fitriana pada tahun 2019 disebutkan bahwa transformasi di bidang pendidikan tinggi merupakan institusi sosial yang berperan penting dalam mendorong dan melanggengkan perubahan. Dorongan untuk perubahan dalam pendidikan tinggi dipicu oleh perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang mungkin melampaui kemampuan beradaptasi model pendidikan saat ini. Sebagai universitas papan atas, perlu mengalami perubahan signifikan agar tetap kompetitif. Selain itu,

universitas menghadapi tantangan untuk berkolaborasi guna menciptakan lingkungan yang adaptif dan mampu merespons dinamika yang selalu berubah. Hal ini bertujuan untuk memprediksi perkembangan di masa depan. Melihat perubahan-perubahan ini sebagai peluang yang menyegarkan dan menstimulasi untuk berpartisipasi aktif dalam tujuan utama pendidikan tinggi, yaitu pembelajaran, dan bukan menganggapnya sebagai sumber kekhawatiran. Transformasi pengelolaan infrastruktur pendidikan sangat penting agar perguruan tinggi dapat beradaptasi dengan cepat dengan tetap berpegang pada nilai dan tujuan dalam mencapai visi dan misinya.

2.2.2 Konsep Pemerataan pendidikan

Mutu dan fokus suatu sistem pendidikan sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. Pendidikan berperan sebagai pilar yang menunjang pembangunan suatu bangsa. Perlu dicatat bahwa sektor pendidikan bukanlah satu-satunya pendorong kemajuan nasional. Pendidikan memegang peranan penting dalam kemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Penting untuk menyadari bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk dan membina potensi siswa, yang akan menjadi pemimpin masa depan masyarakat kita. Tujuan pendidikan tidak diragukan lagi adalah pengembangan individu yang luar biasa, kompetitif, dan berdaya saing global. Jika perekonomian dan politik suatu negara sangat maju, dan memiliki pendapatan belanja yang besar, negara tersebut mungkin masih menghadapi tantangan besar jika sistem pendidikannya tertinggal. Kemajuan suatu bangsa sangat erat kaitannya dengan kemajuan sektor

pendidikannya. Faktanya, tanpa landasan pendidikan yang kuat, stabilitas dan kesejahteraan jangka panjang suatu negara bisa terancam.

Sumber daya manusia inilah sebagai kunci dalam memajukan, menjaga dan mempertahankan bangsa dari kepungan zaman yang serba cepat yang menuntut kecakapan dalam bersaing secara global. Suatu bangsa dapat menjadi bangsa kreatif, inovatif dan kompetitif manakala di sini oleh sumber daya manusia yang maju, cerdas, cakap dan berdedikasi tinggi. Sebaliknya, bangsa yang memiliki sumber daya manusia rendah dapat dipastikan bangsa tersebut tidak berani “unjuk gigi” di mata dunia; di depan negara lain, sulit bersaing dengan negara-negara dunia, dan tidak bisa beradaptasi dengan perubahan zaman yang begitu cepat. Untuk itu, sektor pendidikan sebagai upaya membentuk sumber daya manusia yang cakap sangat diperlukan dan harus menjadi perhatian serius suatu bangsa, selain sektor penyangga yang lain. Dalam memajukan pendidikan di suatu bangsa memang diperlukan juga anggaran yang tidak sedikit, mengingat pendidikan sifatnya berjenjang mulai dasar sampai tingkat tinggi. Bangsa yang mengalokasikan anggarannya ke sektor pendidikan secara besar, maka akan mempengaruhi laju pertumbuhan pendidikan tersebut. Sebaliknya, jika bangsa atau negara mengalokasikan anggaran dengan skala kecil atau rendah, maka tidak bisa diharapkan pendidikan tersebut melaju dengan pesat apalagi merata. Hal tersebut tergantung pada kebijakan dan kepekaan pemerintah, apakah pendidikan menjadi skala prioritas atau hanya sebagai sektor pelengkap.

Disaat pendidikan di abaikan dan pemerintah lebih condong kepada pembangunan infrastuktur saja, ibarat seseorang membangun rumah tanpa membina penghuni rumah. Akibatnya, penghuni rumah tidak bisa menggunakan rumah tersebut sebagaimana mestinya, bisa bisa rumah yang dibangun akan hancur atau tidak berfungsi secara maksimal. Penting tidaknya pendidikan di suatu negara tergantung kecakapan pemimpinnya, jika ia paham secara betul akan pentingnya pendidikan maka ia akan menjadikan pendidikan sebagai sektor utama; prioritas. Sebaliknya, bagi pemimpin suatu bangsa yang menganggap pendidikan sebagai sektor pelengkap, maka dapat dipastikan kejayaan bangsa yang ia pimpin dalam jangka panjang tidak akan bertahan lama

Kemajuan suatu pendidikan tidak bisa diukur hanya pada jumlah siswanya, tenaga pendidiknya, atau akreditasinya, namun masalah sarana prasarana juga perlu diperhatikan. Sarana prasarana menjadi aspek yang juga penting dalam menunjang proses pembelajaran disuatu lembaga pendidikan. Sehebat apapun kurikulumnya, secerdas apapun gurunya tapi jika tidak didukung oleh fasilitas yang memadai (sarana prasarana) akan sulit mencetak peserta didik yang unggul, mutu pendidikan; pembelajarannya akan terkesan monoton; klasikal sehingga mempengaruhi mutu pendidikan di lembaga tersebut. Agar siswa benar-benar berhasil, penting bagi mereka untuk memiliki akses terhadap sumber daya dan fasilitas yang memadai, khususnya di dunia yang berteknologi maju saat ini. Pada akhirnya, ketidakmampuan mereka untuk bersaing dalam skala luas membuat mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan lulusan yang mendapatkan manfaat dari

sumber daya dan dukungan yang komprehensif. Dampak rendahnya infrastruktur tidak hanya berdampak pada pelajar. Kondisi tersebut juga berdampak pada para pendidik, termasuk guru dan dosen, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk berkreasi dan inovatif. Mengingat, media pembelajaran sebagai alatnya tidak ada, mungkin ada tapi tidak maksimal.

Membangun fasilitas di suatu lembaga pendidikan (dunia pendidikan) memerlukan anggaran dari negara, kecuali bagi sekolah madrasah; perguruan tinggi yang dinaungi yayasan atau pesantren besar dan maju sudah tidak memerlukan asupan nutrisi dari negara. Anggaran pendidikan yang dikeluarkan pemerintah cenderung “menganak emaskan” lembaga pendidikan negeri. Sekolah, madrasah atau perguruan tinggi swasta harus mati matian mencari “biaya” hidup secara mandiri untuk tetap eksis. Mereka setiap menjelang ajaran baru selalu diliputi rasa gelisah dan khawatir tentang penerimaan mahasiswa; peserta didik baru, akankah banyak yang mendaftar atukah sedikit atukah tidak ada. Hal ini pasti dan pasti dialami oleh sebagian besar lembaga pendidikan swasta, khususnya yang memiliki fasilitas; sarana rendah.

2.3 Infastruktur Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), di sepandakan dengan kata prasarana hal ini didasarkan pada kata infrastruktur yang memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda. Dengan demikian infrastruktur dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang di bendakan. Sedangkan di bidang perekonomian, infrastruktur dianggap sebagai salah satu jenis modal publik yang diciptakan melalui investasi pemerintah, sebagaimana

dikemukakan oleh Mankiw dan dikutip oleh Warsilan dan Noor (2020). Sistem infrastruktur memainkan peran penting dalam memfasilitasi kelancaran fungsi kegiatan sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sistem infrastruktur mencakup fasilitas, struktur, dan peralatan mendasar yang diperlukan untuk kelancaran operasional sistem sosial dan ekonomi masyarakat (Warsilan & Noor, 2020).

Manajemen infrastruktur pendidikan melibatkan administrasi dan pengawasan fasilitas pendidikan. Prasarana pendidikan mencakup serangkaian fasilitas yang mempunyai peranan tidak langsung namun penting dalam menunjang proses pendidikan. Diantaranya adalah pekarangan, kebun/taman, jalan, lokasi, lahan, parkir, lapangan olah raga, drainase, instalasi listrik, internet, gedung, kantin, dan lainnya (Ahmad Nurabadi, 2019). Menurut Mustari (2019), pengelolaan infrastruktur digambarkan sebagai suatu proses kolaboratif yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan meliputi pengadaan, pemanfaatan, dan pengawasan prasarana dan peralatan yang penting untuk mendukung terselenggaranya pendidikan berkualitas tinggi di sekolah (Ananda & Banurea, 2019).

Mulyasa menyatakan bahwa pengelolaan infrastruktur pendidikan meliputi pengorganisasian dan pemeliharaan infrastruktur tersebut untuk menjamin kontribusinya yang optimal dan bermakna terhadap proses pendidikan. Kegiatan pengelolaannya meliputi perencanaan, pengawasan pengadaan, penyimpanan inventaris, serta penghapusan dan penataan (Mustari, 2019). Menurut Ananda dan

Banurea (2019), pengelolaan sarana dan prasarana di Bafadal melibatkan pendekatan kolaboratif untuk memaksimalkan penggunaan peralatan pendidikan secara efektif dan efisien. Rugaiyah mengartikan pengelolaan prasarana sebagai proses pengawasan sarana dan prasarana di lingkungan sekolah untuk menjamin kelancaran seluruh kegiatan, termasuk pembelajaran dan usaha lainnya (Mustari, 2019). Sedangkan Mustari memberikan definisi pengelolaan infrastruktur secara komprehensif. Hal ini melibatkan serangkaian kegiatan, antara lain perencanaan, pengadaan, pengelolaan inventaris, pendistribusian, pemanfaatan, pemeliharaan, pemusnahan, dan pertanggungjawaban berbagai barang seperti perabot sekolah dan alat pembelajaran (Mustari, 2019). Ananda dan Banurea, pengelolaan sarana dan prasarana meliputi kegiatan yang diperlukan untuk menjamin penyediaan peralatan dan bahan yang tepat untuk kelancaran pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Penataan ini bertujuan untuk memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran melalui berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Ananda & Banurea, 2019).

Fokus utama manajemen pendidikan haruslah pada pengelolaan infrastruktur yang efisien, khususnya infrastruktur pendidikan. Memiliki infrastruktur pendidikan yang memadai dan selaras dengan jenjang dan program studi di perguruan tinggi sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Evolusi teknologi informasi yang dinamis telah membawa perubahan signifikan dalam pendidikan tinggi. Perubahan tersebut mencakup berbagai bidang, antara lain proses belajar mengajar, layanan administrasi akademik, layanan kemahasiswaan, layanan administrasi umum, dan layanan terkait lainnya. Dulu, berbagai tugas

seperti perkuliahan, ujian, pengurusan rencana studi, pembayaran, dan pendaftaran layanan administrasi dilakukan secara langsung. Namun kegiatan tersebut kini telah beralih ke format online. Lanskap pendidikan tinggi di Indonesia sedang mengalami transformasi, sementara aspek-aspek tertentu tetap konsisten dari waktu ke waktu. Perubahan pesat terlihat di lapangan, khususnya dengan munculnya Massive Open Online Courses (MOOCs), yang digambarkan sebagai kursus yang sangat disruptif (Oey-Gardiner dkk., 2017). Mengingat kemajuan teknologi dan keadaan saat ini, penting untuk menyadari pentingnya sarana dan prasarana pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi. Ini mencakup komponen perangkat keras dan perangkat lunak. Sarana dan prasarana pendidikan diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan peraturan tersebut, penyelenggara pendidikan diharapkan memiliki dan memelihara sarana dan prasarana yang memadai. Meski demikian, informasi yang tersedia mengenai sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia masih belum memadai dalam pemberitaan media massa. Fasilitas kegiatan belajar mengajar dalam hal ini kurang layak untuk pembelajaran. Misalnya saja permasalahan fasilitas, antara lain gedung kelas yang bocor, dan bangku sekolah yang rusak atau tidak mencukupi. Informasi ini selaras dengan laporan yang

diterbitkan oleh surat kabar Bogor.com, yang menyoroti berbagai tantangan pendidikan yang dihadapi Indonesia. Permasalahan yang muncul adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Faktor pendukung keberhasilan program pendidikan antara lain sarana dan prasarana (Kurniawati, 2019). Salah satu faktor penyebab kondisi ini adalah kurangnya dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan infrastruktur pendidikan. Moenir (Priatna, 2019) mengemukakan bahwa sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai turut menyebabkan tidak efisiennya tenaga pendidikan dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini menyebabkan tertundanya pekerjaan, terbuangnya waktu, dan terlambatnya penyelesaian masalah.

2.4 Konsep Strategi

Istilah "strategi" berasal dari kata Yunani "strategos" dan "stretaus", yang merupakan bentuk jamak sebagai "strategi". Strategos mengacu pada peran jenderal perang dalam merumuskan rencana efektif untuk mengamankan kemenangan dalam peperangan (Salusu, 2006). Menurut Brecker dalam Heene dkk (2010:53), istilah Strategos mengacu pada perencanaan strategis dan eliminasi musuh secara efektif dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Menurut Jauch & Glueck (Akdon, 2011), strategi didefinisikan sebagai rencana yang kohesif dan mencakup semua yang menghubungkan keunggulan strategis organisasi dengan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungannya. Tujuan dari rencana ini adalah untuk memfasilitasi pencapaian tujuan utama organisasi melalui implementasi yang efektif. Strategi mengacu pada pendekatan sistematis yang digunakan oleh pemimpin organisasi untuk menetapkan tujuan

jangka panjang dan merancang metode efektif untuk mencapainya. Marrus (2002:31).

2.5 Konsep Pembangunan Daerah

Menjajaki Pembangunan Daerah: Ukuran keberhasilan perekonomian suatu daerah terletak pada kemampuannya mencapai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, yang merupakan hasil dari nilai tambah yang dihasilkan dalam suatu wilayah tertentu. Pembangunan merupakan proses kompleks yang mencakup berbagai dimensi, termasuk perubahan struktural, perubahan sikap, faktor kelembagaan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pengentasan kemiskinan. Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan kualitas hidup manusia melalui pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan infrastruktur dan fasilitas, peningkatan potensi ekonomi lokal, dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. . Selama periode 2015-2019, fokus pembangunan daerah adalah pada peningkatan daerah dan komunitasnya, serta pembentukan pusat pertumbuhan untuk mendorong pembangunan daerah berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Pendekatan ini bertujuan untuk membina hubungan antar daerah dan kota.

Pembangunan daerah melibatkan upaya terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan kelompok masyarakat, untuk mengatasi aspek-aspek yang saling terkait dari faktor fisik, sosial-ekonomi, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Diperoleh dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan:

- a. Secara berkala menilai keadaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- b. Menetapkan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah
- c. Membuat konsep strategis untuk pemecahan masalah
- d. Jalankan menggunakan sumber daya yang ada.

2.5.1 Tujuan Pembangunan Daerah

- a. Salah satu tujuan penting adalah mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan komunitas, dengan fokus pada peningkatan kesetaraan dan keadilan. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja.
- b. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.
- c. Menjamin keberlangsungan manfaat sumber daya alam bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dengan melestarikan dan memeliharanya.

2.5.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Pola pembangunan daerah mencerminkan pola tingkat nasional yang dituangkan dalam GBHN. Ini mencakup kebijakan dan strategi untuk jangka panjang dan pendek.
- b. Repelita Daerah merupakan perluasan dari pola pembangunan daerah yang telah ditetapkan, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur.
- c. Rencana tahunan dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan aspek penting dalam perencanaan keuangan di tingkat daerah. Ini berfungsi sebagai kerangka komprehensif untuk mengalokasikan sumber daya dan mengelola keuangan secara ringkas dan efisien. Rencana tahunan ini berfungsi sebagai kerangka penyusunan APBD, yang pada gilirannya merupakan sarana pelaksanaan Repelita daerah. Penting untuk menjalin hubungan yang jelas antara anggaran dan repelita, serta antara GBHN atau pola dasar dan daerah repelita.

2.6 Konsep Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau disebut juga Bappeda merupakan lembaga teknis yang fokus pada penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tanggung jawab utama badan ini adalah membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah mencakup peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh

pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 yang menguraikan sistemnya. Naskah tersebut membahas berbagai peraturan terkait perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara khusus fokus pada perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didorong oleh tujuan untuk meningkatkan koherensi pembangunan di berbagai daerah. Peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah sangatlah penting. Untuk menjamin laju, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah, perlu dilaksanakan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.

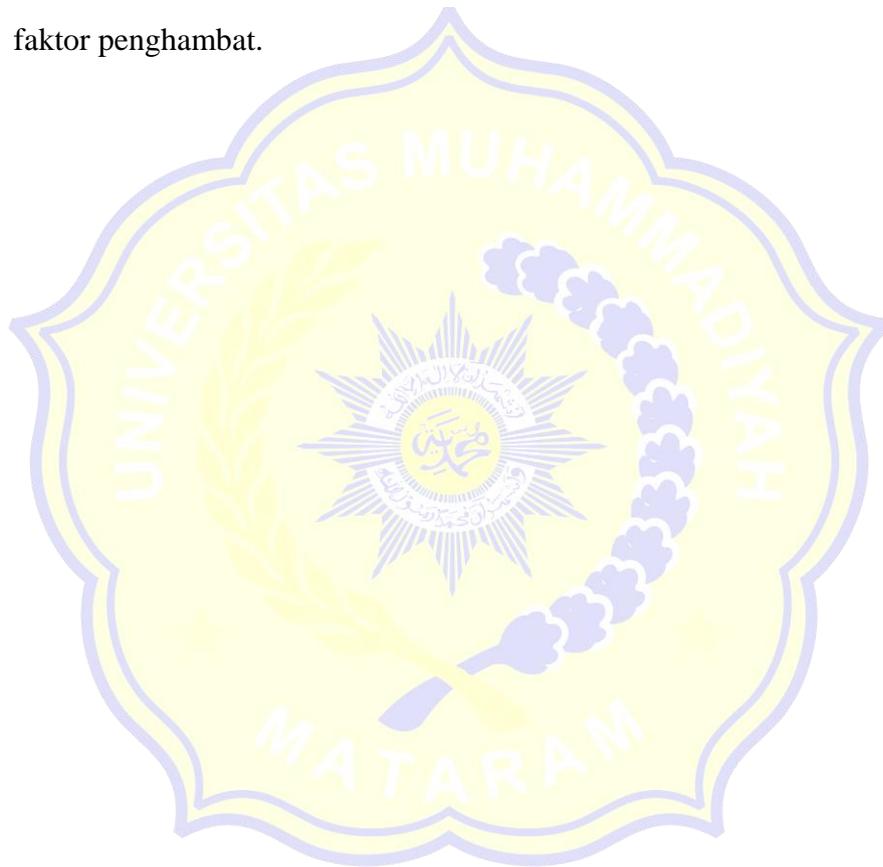
2.7 Kerangka Berpikir

Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di Kota Mataram merupakan pendekatan pionir untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah dan mengedepankan keadilan dalam pembangunan kota secara keseluruhan. Dalam penelitian ini diuraikan rumusan masalah dan peneliti memberikan gambaran berdasarkan judul dan teori yang dibahas. Untuk menilai strategi yang digunakan untuk mengatasi tantangan pembangunan daerah, tiga indikator digunakan:

1. Kebijakan Organisasi
2. Motivasi Pegawai
3. Alokasi Sumberdaya

Dalam penelitian ini dengan judul yang akan menjadi fokus penelitian adalah indikator Strategi yaitu:

1. Kebijakan Organisasi
2. Motivasi Pegawai
3. Alokasi Sumber Daya
4. Faktor Pendukung
5. faktor penghambat.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian dalam kategori deskriptif untuk penelitian ini. Dalam penelitian deskriptif tujuannya adalah untuk mengetahui nilai variabel independen, baik secara individu maupun hubungannya dengan variabel lain, tanpa melakukan perbandingan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif seperti yang dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor. Metode ini melibatkan pengumpulan data deskriptif melalui kata-kata tertulis atau lisan, serta perilaku yang dapat diamati. Selain itu, data numerik dan penjelasan mendalam mengenai integrasi nilai karakter juga dapat disertakan.

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian bertempat di BAPPEDA Kota Mataram. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari jawaban yang ingin di dapat. Penelitian ini dilakukan pada bulan 12 sampai selesai.

3.3 Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer mengacu pada informasi yang peneliti kumpulkan langsung dari sumbernya. Data diperoleh dari sumber di lingkungan kantor BAPPEDA Kota Mataram. Dalam skenario ini, peneliti mengambil peran sebagai pengumpul data. (Susanto, 2006).

2. Data Sekunder

Sumber data primer mengacu pada informasi yang peneliti kumpulkan langsung dari sumbernya. Data diperoleh dari sumber di lingkungan kantor BAPPEDA Kota Mataram. Dalam skenario ini, peneliti mengambil peran sebagai pengumpul data.

3.4 Teknik Informan

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dimana informan dipilih berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian, bukan ditentukan oleh strata, jabatan, atau lokasi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Hal ini melibatkan pengamatan secara cermat dan mempelajari peristiwa dan perilaku dalam lingkungan sosial tertentu yang telah dipilih untuk tujuan penelitian langsung. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana strategi Bappeda diterapkan dalam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur di Kota Mataram, diperlukan kajian lebih lanjut.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan mendalam dengan tujuan tertentu. Sementara itu, melalui serangkaian penyelidikan yang terfokus dan bersifat ilmiah, saya berinteraksi dengan pegawai Kantor BAPPEDA Kota Mataram.

3. Dokumentasi

Faktor ini menjadi pendukung penelitian dan sebagai bukti penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara berkaitan dengan strategi BAPPEDA Kota Mataram.

3.6 Teknik Analisa Data

Untuk menjamin keakuratan dan objektivitas data, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, meliputi analisis konteks, tinjauan pustaka, dan analisis pernyataan yang diperoleh dari wawancara informan. Miles dan Hunerman menguraikan serangkaian tahapan untuk menganalisis data penelitian. Tahapan tersebut meliputi:

1. Pengumpulan data meliputi melakukan wawancara dengan ahli terkait dan melakukan observasi langsung di lapangan untuk mendukung penelitian dan memperoleh sumber data yang diinginkan.
2. *Data reductio* yaitu Proses transformasi data melibatkan penyederhanaan dan pemilihan informasi yang relevan dari data mentah yang dikumpulkan selama penelitian lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya informasi yang paling tepat yang digunakan untuk mengatasi masalah penelitian yang ada.
3. *Data display*) yaitu Proses pengumpulan informasi melalui berbagai format seperti teks naratif, grafik jaringan, tabel, dan bagian dilakukan untuk meningkatkan pemahaman penelitian terhadap data yang dipilih. Informasi tersebut selanjutnya disajikan melalui teks tertulis atau uraian penjelasan.

4. Langkah terakhir melibatkan penarikan kesimpulan atau verifikasi temuan. Langkah ini bertujuan untuk mengungkap pentingnya pola penjas, konfigurasi potensial, aliran sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan diambil secara cermat dengan memverifikasi data melalui penggunaan kembali catatan lapangan untuk memastikan validitasnya.

3.7 Validitas Data

Selain menggunakan reduksi data, peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi untuk menilai keabsahan data. Triangulasi adalah metode yang digunakan untuk memvalidasi data dengan memasukkan sumber tambahan untuk mengembangkan hasil wawancara yang berkaitan dengan subjek penelitian (Moloeng, 2004).

Triangulasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Selain perannya dalam verifikasi data, triangulasi juga digunakan untuk menyempurnakan data. Dalam penelitian yang dilakukan Nasution pada tahun 2003, ditemukan bahwa triangulasi berfungsi sebagai metode yang berharga untuk menilai keakuratan interpretasi data peneliti. Hal ini disebabkan sifat reflektif dari triangulasi. Selain itu, fenomena-fenomena yang terungkap melalui penelitian dapat dianalisis secara menyeluruh, sehingga menghasilkan tingkat kebenaran yang dapat diandalkan jika dikaji dari sudut pandang dan persepsi yang berbeda.

Dalam penelitian kualitatif, triangulasi adalah proses penting yang dilakukan peneliti bersama dengan metode lain untuk menilai validitas informasi

yang dikumpulkan, yang kemudian dimasukkan ke dalam penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang melibatkan penggunaan sumber luar untuk verifikasi atau perbandingan. Metode triangulasi yang umum digunakan melibatkan referensi silang informasi dari berbagai sumber.

